

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberimbangan dalam pemberitaan antara dua pihak yang sedang berseteru menjadi kunci utama objektif atau tidaknya media tersebut. Objektivitas itu sendiri disyaratkan dengan beberapa hal seperti memberikan kesempatan yang sama dalam pemberitaan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah konflik. Konflik di sini dipahami sebagai kasus-kasus persengketaan dan perbedaan pendapat. Sedangkan kesempatan yang sama dipahami sebagai keberimbangan dalam memberikan ruang pada sebuah pemberitaan.

Dalam penafsiran Kode Etik Wartawan Indonesia Pasal 3 dapat dijelaskan bahwa dalam melaporkan dan menyiarkan informasi, wartawan tidak diperbolehkan menghakimi kesalahan seseorang, terutama untuk kasus-kasus yang masih berada dalam proses peradilan. Wartawan juga tidak diperkenankan memasukkan opini pribadinya dan harus melakukan verifikasi terhadap informasi sebelum informasi tersebut dipublikasikan.

Dalam masa pemerintahan presiden SBY yang kedua (Kabinet Indonesia Bersatu II), isu mengenai kenaikan harga BBM ini mulai muncul pada bulan Maret tahun 2012. Pada awal munculnya isu kenaikan harga BBM tersebut, menimbulkan berbagai reaksi dari partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden SBY. Partai-partai yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu II diantaranya adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai

Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Hanura. Dalam berbagai pemberitaan di media massa, dari seluruh partai yang tergabung dalam koalisi, beberapa diantaranya menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Partai tersebut adalah Partai Golkar, PKS, Gerindra, dan Hanura. Sedangkan partai oposisi yang menolak rencana pemerintah adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Penolakan PDIP sebagai partai oposisi terhadap kenaikan harga BBM terkait dengan kepentingan politis dan merugikan banyak pihak. Sedangkan partai yang tergabung dalam koalisi SBY yang sejalan dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM bukan berarti tidak berpihak kepada masyarakat.

Dalam pemberitaan yang diakses dari republika.co.id periode 1 Maret hingga 1 April 2012, pemerintah dan PKS lebih sering muncul. Pemerintah yang dimaksud adalah Presiden SBY dan seluruh kadernya yang tergabung di dalam Partai Demokrat. Pada masa tersebut, konflik pendapat antara PKS dengan Partai Demokrat sudah mulai muncul dan terus berkembang sampai pada akhirnya pemerintah resmi menaikkan harga BBM pada bulan Juni 2013 lalu. Pada masa tersebut, PKS menjadi satu-satunya partai yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) yang menolak kenaikan harga BBM. Pada konflik antara Partai Demokrat dan PKS yang muncul dalam pemberitaan tersebut muncul SBY, Partai Demokrat, dan PKS sebagai pihak-pihak yang sering dipertontonkan dalam pemberitaan. Pemberitaan mengenai partai lain yang ikut menolak kenaikan harga BBM tidak banyak diberitakan. PKS bersikukuh menolak kenaikan harga BBM

dengan alasan kenaikan harga BBM akan membebani dan sangat merugikan masyarakat. Terlebih lagi kenaikan harga BBM ini bertepatan dengan masa-masa tahun ajaran baru dan menjelang bulan Ramadhan, masa di mana harga kebutuhan pokok cenderung naik. Alasan lain PKS bereaksi keras menolak kenaikan harga BBM terhadap pemerintahan SBY, karena adanya peran rakyat yang membesarkan PKS. PKS berpendapat bahwa kenaikan harga BBM menyengsarakan rakyat.

“Tapi apabila PKS harus memilih satu diantara dua, tidak mungkin PKS akan meninggalkan rakyat miskin yang telah membesarkan PKS. Jika opsi yang dipilih pada akhirnya akan menyengsarakan rakyat, maka PKS akan berdiri bersama rakyat,” katanya Rabu (28/3) (republika.co.id, 2014)

Konflik antara PKS dan Partai Demokrat bermula ketika pemerintah Indonesia mengumumkan akan menaikkan harga BBM jenis premium dan solar pada 21 Juni 2013. Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM ini dilakukan dengan pertimbangan sebagai usaha pemerintah dalam mengurangi pengeluaran belanja negara. Sedangkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terus membengkak setiap tahun dan mempengaruhi perekonomian Indonesia (jaringnews.com, 2013).

Terlebih lagi konflik diantara kedua partai ini membuat masyarakat bimbang menanti keputusan apakah harga BBM akan naik atau tidak karena saat ini BBM merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Keresahan di masyarakat ini timbul karena beberapa mata pencaharian mereka berpatokan pada harga BBM.

TRIBUNNEWS.COM – Meski pemerintah belum menaikkan harga BBM, mayoritas sopir angkutan kota (angkot) di Kota Batu sudah resah. Pasalnya, dengan kenaikan BBM nanti, mereka memprediksi jumlah penumpang bakal turun drastis. (tribunnews.com, 2013)

Berita-berita seputar konflik antara PKS dan Partai Demokrat mengenai kenaikan harga BBM ini menarik untuk dikaji karena berita tentang kenaikan harga BBM menjadi hal penting bagi masyarakat. BBM merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti ingin melihat apakah media bersifat netral dengan mewadahi berbagai wacana yang berkembang seputar konflik diantara kedua partai ini, atau justru memiliki kecenderungan tertentu dalam memaparkan fakta terkait konflik ini. Dari penelitian akan dilihat bagaimana media memosisikan diri dalam pemberitaan. PKS dan Partai Demokrat yang tidak sejalan perihal kenaikan harga BBM menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena masyarakat merasa bimbang menanti keputusan naik atau tidaknya harga BBM.

Penelitian ini menggunakan Harian Republika sebagai medianya dan periode yang digunakan selama bulan Maret 2012 hingga Juni 2013. Pemilihan periode ini dikarenakan pada Maret 2012 konflik ini sudah pernah terjadi. Sampai pada akhirnya terus berkembang hingga bulan Juni 2013. Masa-masa tersebut merupakan masa di mana konflik antara PKS dan Partai Demokrat berada di puncak perselisihan. Masing-masing pihak dari setiap partai saling berselisih pendapat.

Penelitian ini meneliti teks berita pada saat puncak konflik diantara kedua partai terjadi. Pemilihan Harian Republika adalah karena adanya unsur kedekatan antara kasus yang akan diteliti dengan Harian Republika. PKS merupakan salah

satu partai politik berbasis agama Islam yang ada di Indonesia. Tidak berbeda dengan *Harian Republika* yang juga merupakan surat kabar dengan basis agama Islam (Keller, 2009:82-83). Ada unsur kedekatan diantara PKS dan *Harian Republika* karena keduanya sama-sama memiliki basis agama Islam. Faktor-faktor tersebutlah yang mendasari peneliti dalam mengangkat tema penelitian ini. Peneliti melihat sejauh mana objektivitas pemberitaan yang disodorkan oleh *Harian Republika*, media yang memiliki basis yang sama yaitu agama Islam, dengan salah satu objek penelitian yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Berdasarkan hasil survei elektabilitas dari lembaga survei Pol-Tracking Indonesia bulan Maret 2014 lalu, seiring dengan masa-masa mendekati Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, PKS merupakan salah satu partai politik dengan basis agama Islam terbesar di Indonesia dan menempati posisi kedua dari lima partai politik berbasis Islam yang ada.

.....
Ada beberapa temuan menarik dari hasil survei nasional dan media monitoring kali ini. Pertama, Berdasarkan temuan riset media monitoring selama musim kampanye 16 Maret - 31 Maret 2014, perhatian publik pada berita partai politik didominasi tema pemberitaan parpol di semua jenis media. Elektabilitas partai berturut-turut, PDIP (22.2%), Golkar (17.2%), Gerindra (7.3%), Demokrat (6.6%), **PKB (5.9%)**, **PKS (5.1%)**, Hanura (3.6%), **PPP (3.2%)**, Nasdem (3.2%), **PAN (2.7%)**, **PBB (0.2%)**, PKPI (0.1%), TidakTahu (TT)/TidakJawab (TJ) sebesar 22.8%.

.....
Temuan-temuan dalam survei ini sebenarnya cenderung tetap, bila dalam beberapa waktu ke depan bila tidak ada “tsunami politik” atau “gempa-gempa politik” berskala besar yang dapat mengubah secara ekstrem peta raihan elektabilitas partai maupun capres secara keseluruhan (poltracking.com, 2014)

Banyak penelitian tentang objektivitas yang pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti ingin melihat bagaimana objektivitas media dalam pemberitaan konflik

PKS dan Partai Demokrat tentang kenaikan harga BBM. Penelitian terdahulu yang terkait dengan pemberitaan dan analisis isi kuantitatif objektivitas adalah penelitian yang dilakukan oleh Christian Natalis (2013) yang menganalisis objektivitas SKH Kompas dan Jawa Pos dalam pemberitaan upaya Palestina menjadi anggota PBB. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pemberitaan SKH Kompas dan Jawa Pos sudah memenuhi prinsip objektivitas yang meliputi *factualness*, *accuracy*, *relevance*, *balance*, *completeness*, dan *neutrality*.

Kedua, adalah penelitian yang dilakukan oleh Stephani Arum Sari (2013) tentang pemberitaan Partai Nasional Demokrat (NasDem) dalam SKH Seputar Indonesia. Penelitian ini ingin mengetahui objektivitas SKH Seputar Indonesia dalam memberitakan Partai Nasional Demokrat. Dalam penelitian ini, dari 11 kategori unit analisis hanya satu kategori yaitu relevansi yang ditinjau dari nilai berita saja yang sepenuhnya memenuhi prinsip objektivitas. SKH Seputar Indonesia masih belum optimal dalam memberitakan peristiwa seputar Partai NasDem, sebagai syarat untuk disebut sebagai berita yang objektif. Dalam penelitian ini, seluruh berita (60 artikel) yang menjadi objek penelitian mengenai Partai Nasdem di SKH Seputar Indonesia mengarah pada nilai berita yang sifatnya penting. Kategori di luar relevansi nilai berita masih belum memenuhi prinsip objektivitas. Berita seputar Partai NasDem didominasi dengan satu sisi saja yaitu dari sisi Partai NasDem itu sendiri maupun Hary Tanoesoedibjo, pemilik SKH Seputar Indonesia. Sebagian besar pemberitaan dalam kasus ini juga diberitakan secara positif.

Penelitian tentang objektivitas ketiga yang serupa adalah penelitian milik Veronika Sekar Hayu Widyaninggar (2014) yang ingin melihat objektivitas SKH Kompas dan Harian Jurnal Nasional dalam pemberitaan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Dari 11 unit analisis yang diteliti, penelitian ini juga menunjukkan bahwa SKH Kompas dan Jawa Pos masih belum optimal dalam memberitakan seputar konvensi Partai Demokrat. Hanya ada satu dari sepuluh unit analisis yang seluruhnya memenuhi syarat objektivitas, yaitu akurasi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pencantuman nama narasumber, jabatan, tempat kejadian, dan waktu terjadinya peristiwa.

Unit analisis yang lainnya masih belum memenuhi prinsip objektivitas karena dalam pemberitaannya masih ada yang memuat fakta psikologis yang berdasar pada interpretasi wartawan, berita yang diberitakan belum seluruhnya memuat unsur kelengkapan 5W + 1H, adanya percampuran opini dan fakta di dalam berita dan masih memuat unsur sensasionalisme. Di dalam pemberitaan mengenai konvensi Partai Demokrat ini juga masih terdapat atribut tertentu dalam mengistilahkan suatu pihak seperti “kubu Cikeas” dan “kubu Anas”.

Peneliti juga melakukan *review* riset serupa terkait dengan objektivitas dari beberapa jurnal ilmiah. Pertama adalah riset milik Jati (2011) yang mengukur kecenderungan objektivitas berita dalam *International Herald Tribune Online* tentang virus H5N1 yang melanda Indonesia pada tahun 2003 lalu. Pemilihan IHT sebagai media didasari adanya hubungan yang kurang baik antara Indonesia dengan Amerika Serikat, sedangkan IHT merupakan pers asing anak dari *The New York Times Company*, salah satu media terbesar di Amerika Serikat. Riset ini

menggunakan metode analisis isi dan berdasarkan pada prinsip objektivitas Westerstahl yang terdiri dari 7 kategori, meliputi jenis fakta, kelengkapan 5W+1H, dimensi berita, nilai berita, relevansi pernyataan narasumber, tipe liputan, dan netralitas pemberitaan. Peneliti melakukan penelitian dengan sampel sejumlah 17 artikel yang terkait dengan topik penelitian.

Pengukuran pertama dilihat dari dimensi *factuality* yang terbagi lagi menjadi sub dimensi lebih kecil yaitu *truth*, yang mengharuskan adanya perbedaan antara opini dengan fakta, dan *relevance* yang akan melihat media dalam memilih dan memilah pernyataan narasumber yang sesuai dengan topik berita yang diangkat. Hasilnya menunjukkan fakta psikologis masih mendominasi pemberitaan jika dibandingkan dengan fakta sosiologis. Ini berarti materi berita yang digunakan oleh wartawan IHT bukan berdasarkan kejadian nyata. Kelengkapan unsur 5W sudah terpenuhi 100%, hanya saja masih terdapat dua sampel berita yang tidak memenuhi unsur *how* yang dapat mempengaruhi pemahaman khalayak terhadap teks berita tersebut. Sebagian besar pengukuran terhadap dimensi berita hanya memuat dimensi kesehatan saja, dan tidak memuat dimensi politik, ekonomi, sosial dan budaya, maupun dimensi pertahanan keamanan. Dari hasil pengkodean juga diperoleh data bahwa lebih dari 94% artikel berita mengandung nilai berita *significance* yang berarti berita-berita tersebut layak muat dan penting diketahui masyarakat.

Pengukuran kedua dilihat dari dimensi *impartiality* yang terbagi lagi menjadi sub dimensi yang lebih kecil yaitu *balance* dan *neutral presentation*. *Balance* mensyaratkan sebuah berita diliput dari berbagai sisi dan hal tersebut

terpenuhi dalam penelitian ini meskipun ada beberapa berita yang hanya memuat berdasarkan dua sisi dan satu sisi. Sedangkan dari sub dimensi *neutral presentation*, lebih dari 50% IHT sudah memenuhi prinsip netral. Maka, hasil penelitian milik Jati (2011) yang dilakukan melalui pengukuran beberapa sub dimensi tersebut menunjukkan bahwa *IHT Online* cenderung objektif dalam memberitakan kasus virus H5N1.

Riset serupa adalah mengenai kecenderungan pemberitaan tentang *reshuffle* kabinet Indonesia Bersatu II dalam SKH Jawa Pos dan SKH Kompas (Darmawan dan Jati, 2012). Penelitian ini diukur dari sembilan unit analisis yang meliputi sifat fakta, kelengkapan unsur-unsur berita, nilai berita, pernyataan narasumber, kaitan pernyataan narasumber dengan isu, konteks berita, pengetahuan narasumber dalam berita, tipe liputan, dan arah penyampaian berita.

Berdasarkan analisis dari sampel artikel menurut sifat fakta, kedua media tersebut didominasi oleh fakta psikologis dalam menuliskan berita, sedangkan yang menjadi fokus adalah fakta sosiologis. Kemudian menurut kelengkapan unsur berita yang mencakup 5W + 1H pada kedua media tersebut secara garis besar sudah memenuhi syarat, terutama SKH Kompas yang secara keseluruhan dari sampel artikel memuat berita dengan unsur-unsur yang lengkap. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan unit analisis nilai berita yang hasilnya hampir serupa dengan unit analisis kelengkapan unsur-unsur berita. Lebih dari 93% SKH Jawa Pos mengandung nilai berita yang tinggi karena mengarah ke *significance*, sedangkan SKH Kompas seluruhnya bernilai berita tinggi dan mengandung informasi penting yang layak diketahui oleh masyarakat.

Kemudian dari unit analisis pernyataan narasumber, kedua media tersebut seluruhnya relevan dengan topik berita dan memenuhi syarat objektivitas. Kaitan pernyataan narasumber dengan isu dari SKH Jawa Pos hampir separuhnya secara khusus tidak terkait langsung, sedangkan dalam SKH Kompas hampir separuhnya terkait langsung dengan isu *reshuffle*. Unit analisis konteks berita membuktikan bahwa hasil wawancara mendominasi kedua media dalam pencarian informasi, sedangkan dari unit analisis pengetahuan narasumber dalam berita sebagian besar masih memuat pengetahuan di luar pengetahuan primer dari narasumber. Dari sisi tipe liputan SKH Jawa Pos didominasi dengan liputan satu sisi, sedangkan SKH Kompas didominasi dengan tipe liputan multi sisi, padahal objektivitas tidak mensyaratkan liputan dari satu sisi saja. Dari arah penyampaian berita, lebih dari separuh dari sampel artikel menunjukkan kedua media tersebut memberikan gambaran negatif mengenai *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II.

Dapat disimpulkan bahwa adanya kesan kurang objektif yang tergambar dengan jelas berdasarkan data yang ada. Data tersebut salah satunya adalah konten wacana yang tidak terkait langsung dengan *reshuffle*. Peneliti memiliki interpretasi terhadap pemberitaan yang kurang objektif ini karena adanya pengaruh dari tuntutan produksi media dan terbatasnya ketersediaan bahan baku dalam pembuatan berita.

Dari beberapa penelitian mengenai objektivitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam melihat kecenderungan media dalam memberitakan suatu peristiwa, masih relevan jika dikaji dengan menggunakan teori objektivitas. Dalam membedah isi berita dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip

objektivitas Westerstahl yang terdiri dari *factualness*, *accuracy*, *relevance*, *balance*, *completeness*, dan *neutrality*.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana objektivitas Harian Republika dalam memberitakan konflik antara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat tentang Kenaikan Harga BBM periode Maret 2012-Juni 2013?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui objektivitas Harian Republika dalam memberitakan konflik antara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat periode Maret 2012-Juni 2013.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah referensi mengenai analisis isi tentang objektivitas dalam dunia jurnalistik di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran objektivitas tentang jurnalistik Harian Republika dalam memberitakan konflik antara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat mengenai kenaikan harga BBM.

E. Kerangka Teori

1. Teori Objektivitas

Penelitian ini akan membicarakan tentang objektivitas Harian Republika dalam memberitakan seputar konflik antara PKS dan Partai Demokrat tentang kenaikan harga BBM. Media memiliki peran dalam menyajikan informasi bagi khalayak luas dan berita menjadi produk terpenting yang dihasilkan. Berita yang dihasilkan tersebut diperoleh berdasarkan suatu fakta peristiwa yang terjadi di lapangan. Dalam Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) Pasal 3 juga dinyatakan bahwa wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat (Nurudin, 2009:315).

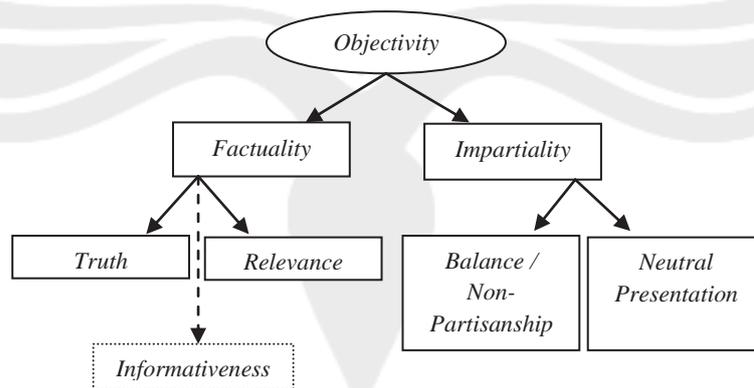
Pernyataan tersebut memiliki makna bahwa dalam sebuah berita mengharuskan adanya keseimbangan dalam memberikan ruang kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah peristiwa. Namun ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi fakta peristiwa tersebut pada saat proses pembuatan berita dilakukan. Objektivitas tetap ada, namun ketika sudah masuk ke dalam pikiran, objektivitas tersebut sudah banyak dipengaruhi berbagai macam nilai. Begitu pula dengan objektivitas di media massa yang bersifat subjektif karena telah tercampur dengan konstruksi pikiran dan lembaga media (Nurudin, 2009:80).

Unsur-unsur yang berkaitan dengan makna objektivitas juga diungkapkan Boyer yang dikutip oleh McQuail dalam buku *Media Performance: Mass Communication and the Public Interest* (1992:184). Unsur-unsur tersebut yaitu pertama, jurnalis harus seimbang dalam menyajikan sisi yang berbeda dari suatu

peristiwa. Kedua, suatu peristiwa harus diungkapkan secara akurat dan sesuai dengan realitas. Ketiga, semua poin-poin disajikan secara relevan. Keempat, adanya pemisahan antara fakta dan pendapat, tetapi menyajikan pendapat-pendapat yang relevan. Kelima, meminimalkan pengaruh, sikap, pendapat atau keterlibatan penulis dalam berita. Keenam, penulis berita harus menghindari adanya bias, kebencian serta tujuan yang licik (McQuail, 1992:184-185).

Berbagai macam kriteria disodorkan untuk mengamati objektivitas media massa. Salah satu diantaranya adalah yang dikemukakan oleh Westerstahl. Denis McQuail dalam bukunya yang berjudul *Media Performance: Mass Communication and the Public Interest* (1992:196), mengutip skema kemudian menguraikan kerangka objektivitas yang dikemukakan oleh Westerstahl sebagai berikut:

BAGAN 1
Skema Objektivitas Westerstahl



Sumber: McQuail (1992:196)

Objektivitas terdiri dari dua aspek yaitu aspek kognitif dan aspek evaluatif (McQuail, 1992:197 dan 200). Aspek kognitif berkaitan dengan kualitas informasi dari suatu berita. Sedangkan imparialitas atau ketidakberpihakan terkait dengan satu atau dua sisi dari sebuah berita (Eriyanto, 2011:194). Aspek evaluatif (imparialitas) terbagi menjadi dua sub dimensi, yaitu *balance* dan *neutrality*. Dalam konsep ketidakberpihakan, keseimbangan (*balance*) merujuk pada sudut pandang terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu peristiwa.

Menilai netralitas lebih mengarah pada penggunaan kata-kata bermakna konotasi (McQuail, 1992:201). Sub dimensi netralitas terbagi menjadi empat kategori meliputi, *sensationalism*, *stereotype*, *juxtaposition*, dan *linkages* (McQuail, 1992:232-234). Berdasarkan sub dimensi netralitas yang diutarakan oleh McQuail tersebut, hanya kategori sensasionalisme saja yang digunakan oleh peneliti karena kategori tersebut terkait langsung dengan topik dalam penelitian ini. Penyajian secara netral, terkait pada masalah diantaranya penempatan di mana berita tersebut disajikan, pemilihan *headline*, dan pemilihan kata. Objektivitas mensyaratkan informasi yang disampaikan tidak memihak, terorganisir, dan berhati-hati. Dari hal tersebut, segala macam bentuk sensasi seperti penggunaan kata-kata, emosi yang terkandung di dalam berita, dan bentuk penyajian dari sebuah berita merupakan bentuk dari sensasionalisme itu sendiri. Emosi dan dramatisasi yang terkandung di dalam berita merupakan cara untuk menarik perhatian. Dalam media cetak, sensasionalisme tersebut dapat berupa penulisan judul pada *headline* yang menggunakan huruf besar dan ilustrasi fotografi (McQuail (1992:232-233)).

Uraian di atas menjadi alasan bagi peneliti hanya memilih sensasionalisme saja pada unit analisis netralitas. Sensasi merupakan langkah pertama yang dilakukan, supaya pembaca menjadi tertarik terhadap suatu berita. Terlebih kasus yang digunakan adalah kasus pertentangan, yang diberitakan secara sensasional yang ditunjukkan dengan penulisan judul secara mencolok, serta penggunaan warna-warna yang mencolok pada beberapa judul berita

Aspek Kognitif

Aspek kognitif terkait dengan kualitas informasi. Kualitas informasi sendiri tidak terpisahkan dari faktualitas yang terbagi menjadi dua sub dimensi penting yaitu *truth* atau kebenaran dan relevansi atau *relevance* (McQuail, 1992:196). Dapat dikatakan bahwa faktualitas merupakan fakta yang sesungguhnya terjadi yang dapat dibuktikan kebenarannya dengan panca indra.

Sub dimensi yang pertama adalah *truth* atau kebenaran. Kebenaran terkait dengan sejauh mana berita menyampaikan informasi dengan benar. Wartawan dalam menyampaikan sebuah berita tidak diperbolehkan melakukan pemihakan kepada salah satu pihak yang tengah bertikai. Karena seharusnya sudut pandang baru dari sebuah konflik diberikan oleh wartawan. Jika nampak adanya keberpihakan terhadap salah satu pihak yang sedang berkonflik maka berita tersebut bukan lagi berita yang objektif. (Nurudin, 2009:83)

Informasi yang disampaikan dengan benar dapat terbentuk karena disyaratkan oleh beberapa subdimensi yang lebih kecil lagi yaitu meliputi faktual (*factualness*), akurasi (*accuracy*), dan lengkap (*completeness*) (McQuail,

1992:197). Faktual berarti adanya pemisahan fakta dari opini, interpretasi atau komentar. Hal ini terkait dengan ada atau tidaknya penonjolan salah satu tokoh secara sengaja oleh wartawan dalam sebuah peristiwa. Media memiliki kemungkinan besar mengarahkan opini khalayak untuk mendukung salah satu tokoh dari terjadinya sebuah peristiwa. Jika pengarahan opini khalayak ini terjadi, maka berita tersebut bukan lagi melaporkan peristiwa yang benar-benar terjadi.

Adanya verifikasi atau *check* dan *recheck* yang dilakukan oleh wartawan terkait dengan sub dimensi keakuratan. Lengkapnya sebuah berita berupa laporan yang utuh tanpa menghilangkan sedikitpun bagian dari sebuah peristiwa. Hal ini ditunjukkan dengan tidak melakukan pemotongan paragraf dan kalimat secara asal-asalan (Nurudin, 2009:83). Berita juga dikatakan lengkap jika memenuhi unsur 5W+1H. Berita dikatakan akurat dan lengkap jika adanya kesesuaian antara berita dengan peristiwa yang sebenarnya, serta suatu peristiwa telah diberitakan secara keseluruhan. (Eriyanto, 2011:195)

Kedua, relevansi (*relevance*) menunjukkan apakah berita yang disajikan sudah relevan. Relevansi tidak mengutamakan penyajian, namun lebih mengutamakan proses seleksi. Wartawan melakukan proses seleksi ini yang memiliki peranan penting dari sebuah berita apakah berita tersebut berkaitan atau tidak. Berkaitan atau tidaknya sebuah berita dapat dipahami sebagai ada atau tidaknya hubungan antara narasumber yang digunakan dalam sebuah berita terhadap peristiwa yang diangkat dalam berita tersebut. Keterkaitan antara judul dengan isi berita juga menjadi indikator relevansi dari sebuah berita.

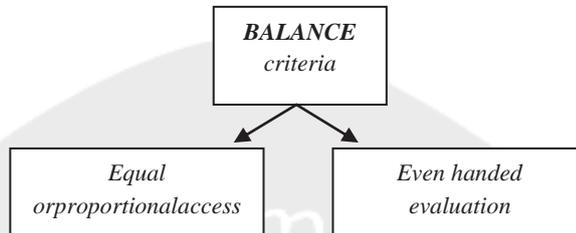
Kriteria relevansi juga dapat dilihat berdasarkan proses *news selection* (seleksi berita), mulai dari pemilihan waktu (*timeliness*), topik berita (*topicality*) dan aspek nilai berita lainnya dari suatu peristiwa yang terjadi (McQuail, 1992:200). Aspek *closeness* (kedekatan) dan aspek *scale* atau besarnya skala suatu peristiwa juga dipertimbangkan ketika hendak dijadikan berita. Relevansi juga terkait dengan nilai berita yang akan mensyaratkan kelayakan dari sebuah berita. Nilai berita digunakan sebagai indikator untuk mengukur kualitas pemberitaan tersebut. Nilai berita meliputi *significance*, *magnitude*, *prominance*, *timeless*, *proximity*, dan *human interest*.

Ketiga, *informativeness* merupakan ada atau tidaknya unsur-unsur pendukung untuk melengkapi sebuah berita dengan tujuan semakin mempermudah pembaca dalam memahami isi berita. Unsur-unsur tersebut harus berkaitan dengan peristiwa yang diberitakan, meliputi foto, gambar, gaya penulisan, tabel, dan grafik.

Dimensi Evaluatif

Elemen kedua dari konsep objektivitas menurut Westerstahl adalah imparsialitas. Imparsialitas berkaitan dengan sistematis atau tidaknya suatu berita dalam menampilkan satu sisi atau dua sisi dari peristiwa yang diberitakan (Eriyanto, 2011:194). Imparsialitas menekankan ada atau tidaknya keberpihakan dengan salah satu pihak dalam sebuah peristiwa. Imparsialitas terdiri dari dua aspek penting yaitu *balance* (berimbang) dan *neutrality* (netral) (McQuail, 1992:201-204).

BAGAN 2
Dimensi dan Kriteria *Balance* McQuail

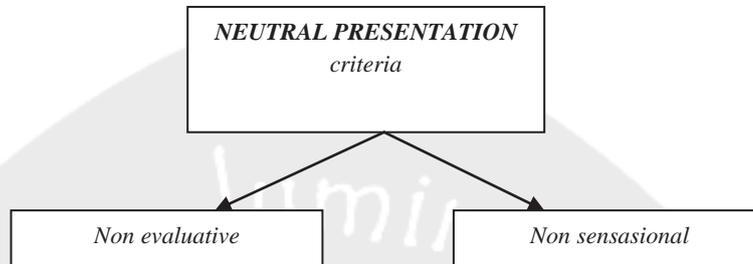


Sumber: McQuail (1992:203)

Pertama, berimbang terkait dengan ditampilkannya semua sisi dari sebuah berita dengan tidak menghilangkan dan memilih sisi tertentu untuk diberitakan. Berita dapat dikatakan berimbang jika memenuhi aspek-aspek proporsional dan dua sisi. Aspek proporsional melihat apakah masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa yang diberitakan sudah memperoleh kesempatan yang sama. Sedangkan aspek dua sisi melihat apakah masing-masing perdebatan dalam sebuah peristiwa sudah disajikan (Eriyanto, 2011:195).

Kedua, netral (*neutrality*) melihat apakah suatu peristiwa diberitakan apa adanya dan tidak memihak salah satu pihak. Berita dikatakan netral apabila memenuhi aspek *non evaluatif* dan *non sensasional*. Jurnalis tidak melebihkan fakta dari suatu peristiwa yang akan diberitakan (Eriyanto, 2011:195).

BAGAN 3
Dimensi dan Kriteria *Neutrality* McQuail



Sumber: McQuail (1992:203)

Seperti dikatakan Nurudin yang dikutip dari McQuail (2000), objektif paling tidak mengandung faktualitas dan imparialitas. Faktualitas memiliki makna kebenaran yang memuat akurasi dan sesuatu yang dikaitkan harus relevan untuk diberitakan. Akurasi terkait dengan ketepatan dan kecermatan jurnalis dalam membuat sebuah berita. Sedangkan imparialitas dipahami sebagai adanya keseimbangan dan netralitas dalam memberitakan suatu peristiwa.

Maka dari itu, media memenuhi prinsip objektivitas jika masing-masing sub dimensi dari seluruh sub dimensi yang ada juga objektif. Ini artinya adalah jika ada satu saja sub dimensi yang tidak objektif dari keseluruhan sub dimensi yang ada, maka media tersebut tidak objektif dalam memberitakan suatu peristiwa. Berdasarkan teori objektivitas yang diutarakan oleh Westerstahl telah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini masih relevan diteliti dari sisi objektivitas media.

2. Analisis Konflik

Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik (Wirawan, 2010:5). Analisis konflik berguna untuk melihat rekonstruksi konflik antara PKS dan Partai Demokrat tentang kenaikan harga BBM pada Harian Republika. Analisis konflik juga digunakan untuk melihat Harian Republika dalam menyajikan konflik tersebut.

Organizational conflict is the clash that occurs when the goal-directed behavior of one droup blocks or thwarts the goals of another (Gareth R. Jones, 1995 dalam Wirawan 2010:5)

Penelitian ini menganalisis bagaimana konstruksi yang dilakukan oleh Harian Republika mengenai konflik antara PKS dan Partai Demokrat melalui artikel berita yang disajikan. Peneliti menggunakan peta konflik Ricardo Ramires yang terbagi menjadi tiga substansi, yaitu akar konflik, para pihak (*stakeholders*), dan dinamika konflik (Anto dkk, 2007:48).

a. Akar / Sumber Konflik

Pemberitaan mengenai sebuah konflik kerap digambarkan dengan tidak lengkap, sehingga muncul kesan bahwa konflik tersebut muncul secara tiba-tiba. Sedangkan akar konflik dapat dilihat dari berbagai dimensi yaitu politik, sosial, budaya, ekonomi dan sejarah (Anto dkk, 2007:49).

TABEL 1

Sumber-Sumber Konflik Kontemporer: Sebuah Kerangka

TINGKAT	CONTOH
Global	Transisi geopolitik, pembagian Utara-Selatan
Regional negara	Pola patron, demografi sosial lintas perbatasan
- Sosial	Masyarakat yang lemah; pembagian budaya, ketidakseimbangan etnis
- Ekonomi	Ekonomi yang lemah; sumber alam yang miskin, kerugian relatif
- Politik	Pemerintahan yang lemah; pemerintahan partisan, rezim yang tak punya legitimasi
Kelompok Konflik	Mobilisasi konflik, dinamika antarkelompok
Elit / Individual	Kebijakan kelompok eksklusionis, kepentingan faksional, kepemimpinan yang serakah

Sumber: Anto dkk (2007:50)

Sumber-sumber konflik tersebut dipicu oleh beberapa faktor yang menyebabkan hubungan yang terjalin mengencang dan pada akhirnya terjadi perbenturan. Pemicu tersebut antara lain adalah informasi yang tidak akurat, hubungan antar-sesama yang buruk baik hubungan secara komunikasi maupun hubungan secara tatap muka. Standar, aturan, kebijakan, atau prosedur yang kontroversial dan harapan yang tidak terpenuhi juga menjadi faktor pemicu konflik (Anto dkk, 2007:50).

b. Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

Pemangku kepentingan adalah siapa saja yang terlibat di dalam konflik baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak-pihak tersebut merupakan kalangan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh konflik. Penggambaran pihak terkait dalam media massa sering tidak proporsional (Anto dkk, 2007:51).

Pembedaan para pihak sesuai kompetensinya perlu dilakukan agar tidak menimbulkan konflik baru (Anto dkk, 2007:52).

- Pihak pertama, adalah mereka yang saling menentang atau berkelahi sekaligus berkepentingan dengan hasil konflik.
- Pihak kedua, adalah mereka yang merupakan sekutu dari pihak pertama, tidak terlibat secara langsung dalam konflik, yang dapat berubah menjadi pihak pertama ketika konflik memanas.
- Pihak ketiga, adalah mereka yang berkepentingan dengan penanganan konflik.

c. Dinamika Konflik

Konflik terjadi seperti sebuah siklus kehidupan. Kemunculannya akan mencapai klimaks yang emosional bahkan dapat menimbulkan kekerasan. Konflik kemudian mereda, lalu menghilang, dan pada akhirnya muncul kembali (Anto dkk, 2007:56).

F. Kerangka Konsep

1. Pers

Pers dalam arti sempit merujuk pada media cetak yang terbit secara berkala seperti surat kabar, tabloid, dan majalah. Sedangkan pers dalam arti luas bukan hanya merujuk pada media cetak yang terbit secara berkala, tetapi juga meliputi media elektronik seperti radio, televisi, film, dan internet (Sumadiria, 2005:31).

Pengertian pers menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia (Nurudin, 2009: 321).

Pengertian pers dalam arti luas juga biasa disebut dengan media massa. Media massa merupakan sebuah saluran untuk menyampaikan informasi kepada khalayak. Media massa melakukan serangkaian kegiatan jurnalistik mulai dari proses pra produksi, produksi, hingga pasca produksi yang diolah sedemikian rupa, kemudian dipublikasikan kepada masyarakat melalui sarana penyaluran informasi yang ada.

Menurut Barus (2010:16), pers memiliki beberapa fungsi yaitu (1) Memberikan informasi, hal ini meliputi penyampaian informasi yang aktual, akurat, penting, menarik, lengkap, dan bermanfaat kepada masyarakat secara cepat. (2) Mendidik, dalam hal ini, informasi yang disampaikan harus mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan kecerdasan. (3) Menghibur, dapat dijelaskan bahwa ulasan-ulasan yang disampaikan oleh pers menyajikan hiburan yang mendidik. Ulasan yang disampaikan harus menghindari hal-hal yang bersifat negatif. (4) Sarana kontrol sosial, fungsi kontrol sosial yang dilakukan oleh pers adalah melakukan pengawasan terhadap lembaga tinggi negara yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Kebebasan pers menuntut keterbukaan dari berbagai pihak agar koreksi, pengawasan, dan kritik yang disampaikan bisa mencapai objektivitas yang tinggi, jujur, berimbang, dan *cover both sides* (Barus, 2010:18).

Menurut Sumadiria (2005:35-38), pers memiliki karakteristik spesifik yang terdiri sebagai berikut:

- a. Periodesitas, pers memiliki jangka waktu terbit yang teratur dan harus selalu konsisten.
- b. Publisitas, lingkup jangkauan publikasi pers mencakup seluruh lapisan masyarakat dan harus disampaikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat pada umumnya.
- c. Aktualitas, informasi yang disampaikan harus selalu baru. Barunya informasi dapat dipahami sebagai peristiwa yang baru saja terjadi atau sedang terjadi.
- d. Universalitas, peristiwa yang dilaporkan merupakan hasil pencarian peristiwa yang terjadi dari berbagai sudut. Peristiwa yang diberitakan tidak hanya merujuk pada satu permasalahan saja, tetapi juga permasalahan-permasalahan lain yang penting dan menarik untuk dilaporkan.
- e. Objektivitas, berita yang dilaporkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi, jelas, apa adanya, dan tidak mengarahkan opini pembaca.

2. Berita

Hampir seluruh surat kabar berisi berita. Belum ada batasan yang pasti mengenai definisi berita. Banyak definisi berita yang disampaikan oleh pakar jurnalistik, salah satunya adalah William S. Maulsby seperti dikutip oleh Barus

(2010:26). Menurut Maulsby, berita adalah suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta-fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi yang dapat menarik perhatian para pembaca surat kabar yang memuat berita tersebut. Peristiwa akan menjadi sebuah berita jika faktanya aktual, menarik, penting dan dilaporkan melalui media massa sebagai sarannya. Jika peristiwa tidak tersampaikan kepada publik, maka hal tersebut bukan sebuah berita (Barus, 2010:27).

Peristiwa layak dikatakan menjadi sebuah berita apabila memenuhi kriteria layak berita. Siregar (1998:27-28) mendeskripsikan kriteria layak berita tersebut sebagai berikut:

- a. *Significance* (Penting), yaitu kejadian yang memiliki kemungkinan dapat mempengaruhi kehidupan orang banyak, atau kejadian yang menimbulkan akibat terhadap kehidupan pembaca.
- b. *Magnitude* (Besar), yaitu kejadian yang berkaitan dengan angka-angka yang berarti bagi kehidupan orang banyak, atau kejadian yang menimbulkan suatu akibat yang bisa dijumlahkan dalam angka yang menarik bagi pembaca.
- c. *Timeliness* (Waktu), yaitu kejadian yang berkaitan dengan hal-hal yang baru saja terjadi.
- d. *Proximity* (Kedekatan), yaitu dekatnya antara peristiwa yang terjadi dengan pembaca. Kedekatan ini bisa bersifat geografis ataupun emosional.
- e. *Prominence* (Tenar), yaitu berkaitan dengan hal-hal seperti orang, benda, atau tempat yang terkenal atau sangat dikenal oleh pembaca.

- f. *Human interest* (Manusiawi), yaitu kejadian yang menyentuh hati pembaca seperti kejadian yang menyangkut orang biasa dalam situasi luar biasa, atau orang besar dalam situasi biasa.

Luwi Ishwara dalam buku *Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar* (2005:53) menambahkan konflik sebagai nilai berita, yang layak untuk dijadikan sebagai sebuah berita. Konflik seperti perang atau perkelahian layak menjadi berita karena pada umumnya menimbulkan kerugian dan adanya korban. Begitu pula dengan debat-debat (konflik) dan isu-isu yang menyangkut kehidupan memperoleh tempat penting dalam pemberitaan.

G. Unit Analisis

NO.	DIMENSI	SUB UNIT ANALISIS	KATEGORISASI
1.	Faktualitas	Faktualitas	a. Fakta sosiologis b. Fakta psikologis
		Verifikasi	a. Ada b. Tidak ada
		Percampuran opini dan fakta	a. Ada b. Tidak ada
		Relevansi narasumber dengan pemberitaan	a. Relevan b. Tidak relevan
		Nilai berita	a. Mengarah ke <i>significance</i> b. Mengarah ke <i>human interest</i>
		Relevansi judul dengan isi berita	a. Relevan b. Tidak relevan
		Unsur pendukung berupa gambar, tabel, foto, grafik, dll.	a. Ada b. Tidak ada
		5W+IH	a. Lengkap b. Tidak lengkap

2.	Imparsialitas	Sensasionalisme	a. Ada b. Tidak ada
		<i>Cover both side</i>	a. Satu sisi b. Dua sisi c. Multi sisi
		<i>Even handed evaluation</i>	a. Positif b. Negatif c. Netral

H. Definisi Operasional

H.1 Faktualitas

1. Kebenaran (*Truth*)

Kebenaran mengarah kepada sejauh mana berita menyampaikan informasi dengan benar.

a. Fakta Sosiologis

Apabila berita tersebut dibuat berdasarkan peristiwa atau kejadian nyata. Misalnya, konflik antara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat tentang kenaikan harga BBM diberitakan berdasarkan kenyataan yang ada, tanpa memasukkan opini pribadi ataupun opini dari pihak-pihak tertentu.

b. Fakta Psikologis

Apabila berita tersebut dibuat berdasarkan pernyataan atau opini dari narasumber (interpretasi subjektif) terhadap sebuah peristiwa yang terjadi. Misalnya, berita konflik antara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat tentang kenaikan harga BBM hanya memuat opini dari narasumber dalam menanggapi konflik diantara kedua partai tersebut. Berita juga dikatakan

memuat fakta psikologis jika memuat adanya kata-kata mungkin, seperti, atau kelihatannya.

2. Akurasi (Accuracy)

2.1. Verifikasi Data

- a. Ada**, apabila terdapat verifikasi data dalam berita dan data tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Verifikasi data meliputi adanya nama narasumber dan jabatan, tempat terjadinya peristiwa, waktu kejadian yang dicantumkan dengan lengkap dan tepat.
- b. Tidak Ada**, apabila tidak terdapat verifikasi data dalam berita dan data tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, tidak dicantulkannya nama narasumber dari sebuah informasi yang disampaikan, tidak disebutkan di mana tempat dan waktu terjadinya sebuah peristiwa.

2.2 Percampuran Opini dan Fakta

- a. Ada**, apabila wartawan memasukkan opini atau pendapat pribadinya di dalam berita. Jika terdapat kata-kata mungkin, seperti, nampaknya, kelihatannya, seakan-akan dan sebagainya maka berita tersebut mengandung opini atau pendapat dari wartawan.
- b. Tidak Ada**, apabila tidak terdapat opini atau pendapat dari wartawan di dalam berita.

3. Relevansi (*Relevance*)

Relevansi berkaitan dengan dari mana sebuah fakta diperoleh. Pada dasarnya, sebuah fakta diperoleh dari sumber berita yang dapat dipercaya misalnya seperti saksi peristiwa, orang yang mengalami peristiwa tersebut secara langsung (pelaku dan korban), atau ahli yang memiliki kemampuan dalam memahami peristiwa yang terjadi. Relevansi juga dilihat berdasarkan nilai berita yang berguna sebagai indikator apakah berita tersebut dikatakan sebagai layak atau tidak layak berita. Berita dikatakan layak untuk dimuat jika memenuhi nilai berita secara lengkap. Selain itu, relevansi juga dapat dilihat dari kesesuaian antara judul dengan isi berita.

3.1 Relevansi Narasumber

Melihat apakah narasumber yang digunakan adalah orang-orang yang terkait secara langsung dengan peristiwa yang terjadi.

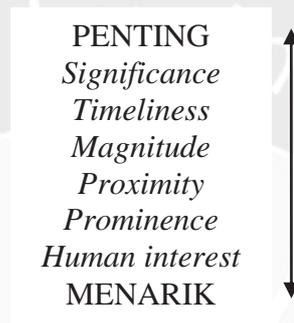
- a. **Relevan**, apabila narasumber yang digunakan terkait dengan peristiwa yang diberitakan dan memberikan informasi dengan jelas. Misalnya, berita konflik antara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat tentang kenaikan harga BBM memilih Anis Matta selaku Ketua Umum PKS dan Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum dari Partai Demokrat sebagai narasumber.
- b. **Tidak Relevan**, apabila narasumber yang digunakan tidak terkait dengan peristiwa yang terjadi. Misalnya, dalam kasus yang sama, narasumber yang dipilih adalah orang-orang dari partai lain selain Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Hal ini menunjukkan bahwa berita tersebut tidak relevan dalam pemilihan pencantuman narasumber.

3.2 Nilai Berita

Nilai berita akan menentukan apakah sebuah peristiwa layak atau tidak layak menjadi sebuah berita. Layak atau tidaknya sebuah berita dapat dilihat dari unsur-unsur seperti *significance*, *magnitude*, *timeliness*, *proximity*, *prominence*, dan *human interest*.

- i. *Significance*, yaitu fakta mempengaruhi kehidupan orang banyak. Misalnya, apakah pemberitaan mengenai konflik antara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat tentang kenaikan harga BBM memberikan pengaruh bagi masyarakat Indonesia.
- ii. *Magnitude*, yaitu fakta berhubungan dengan besaran angka yang menjadi sesuatu hal yang berarti. Misalnya, apakah pemberitaan mengenai konflik antara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat tentang kenaikan harga BBM memuat angka atau jumlah tertentu dan dapat menarik pembacanya.
- iii. *Timeliness*, yaitu fakta yang diberitakan baru terjadi dan sifatnya masih aktual. Misalnya, apakah pemberitaan mengenai konflik antara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat tentang kenaikan harga BBM baru saja terjadi atau belum lama terjadi.
- iv. *Proximity*, yaitu fakta yang lokasi kejadiannya dekat dengan tempat tinggal pembaca atau adanya kedekatan secara emosional dengan pembaca.
- v. *Prominence*, yaitu fakta yang terjadi berkaitan dengan orang, benda, atau tempat yang terkenal. Misalnya, apakah pemberitaan mengenai konflik antara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat tentang kenaikan harga BBM berhubungan dengan orang-orang yang memiliki jabatan tinggi di Indonesia.

vi. *Human interest*, yaitu fakta yang menarik rasa kemanusiaan dan dapat menyentuh hati pembaca. Misalnya, perdana menteri yang menggunakan transportasi umum saat menuju ke kantor. Penilaian relevansi berdasarkan nilai berita dapat dilihat sebagai berikut:



Sumber: Siregar (1998:30)

Terdapat dua kategori dalam sebuah berita, yaitu kategori penting dan kategori menarik. Berita yang mengarah ke kategori penting adalah berita yang memuat nilai *proximity*, *magnitude*, *timeliness*, dan *significance* yang berarti lebih mengutamakan aspek penting dari terjadinya suatu peristiwa. Misalnya, berita mengenai persetujuan antara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat yang tidak sependapat akan dinaikkannya harga BBM.

Sedangkan berita yang mengarah ke kategori menarik adalah berita yang memuat nilai *prominence* dan *human interest*. Ini berarti berita tersebut lebih mengutamakan aspek menarik dan hanya memuat sedikit nilai penting dari terjadinya suatu peristiwa. Misalnya, berita mengenai kekhawatiran masyarakat miskin Indonesia yang menanti putusan pemerintah apakah jadi atau tidaknya harga BBM dinaikkan.

3.3 Relevansi Judul dengan Isi Berita

- a. **Relevan**, apabila judul dan isi berita saling berhubungan. Apakah judul berita sesuai dengan isi berita, atau isi berita memuat bahasan-bahasan yang terkait dengan judul berita.
- b. **Tidak Relevan**, apabila antara judul dan isi berita tidak berkaitan.

4. *Informativeness*

Informativeness merupakan elemen-elemen tambahan yang ada di dalam berita seperti gambar, foto, tabel, bagan, grafik, atau gaya penulisan. Adanya elemen-elemen tambahan ini bertujuan untuk membuat berita semakin jelas dan lengkap.

5. Kelengkapan (*Completeness*)

Informasi yang ada di dalam sebuah berita memuat unsur-unsur 5W+1H, sebagai syarat dari kelengkapan sebuah berita.

- a. **Lengkap**, apabila di dalam berita memuat unsur 5W+1H yang terdiri dari *what*, *who*, *why*, *where*, *when*, dan *how*. *What*, menjelaskan peristiwa apa yang sedang terjadi. *Who*, menyebutkan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. *Why*, menjelaskan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. *Where*, merupakan penjelasan di mana terjadinya peristiwa tersebut. *When*, megutarakan kapan peristiwa tersebut terjadi, dan *how* menjelaskan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi dan akibat apa yang muncul dari terjadinya peristiwa tersebut.

- b. Tidak Lengkap**, apabila berita tidak memuat salah satu unsur atau lebih dari 5W+1H.

H.2 Imparsialitas (*Impartiality*)

2.1 Netralitas (*Neutral Presentation*)

Melihat ada atau tidaknya keberpihakan terhadap fakta yang diberitakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan ada atau tidaknya penilaian di dalam berita yang dilakukan oleh wartawan, untuk mengarahkan pembaca pada suatu opini tertentu. Berita dapat dikatakan netral dengan indikator berikut ini:

2.1.1 Sensasionalisme

- a. Ada**, apabila judul berita maupun isi berita mengandung unsur sensasional. Misalnya, judul berita ditulis dengan ukuran yang besar dan dengan warna yang mencolok. Bisa juga berita dituliskan dengan kata-kata yang berlebihan.
- b. Tidak Ada**, apabila judul maupun isi berita tidak mengandung unsur sensasional.

2.2 Keseimbangan (*Balance*)

Keseimbangan merupakan meratanya pendapat yang disajikan di dalam sebuah berita, yang memuat pendapat-pendapat tertentu. Berita dapat dikatakan seimbang dengan melihat indikator berikut ini:

2.2.1 Cover Both Side

Memberikan tempat secara seimbang bagi kedua pihak yang sedang berkonflik. Indikator *cover both side* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. **Satu Sisi**, berita hanya menyajikan fakta dari pendapat satu sumber saja. Misalnya, berita konflik Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat tentang kenaikan harga BBM ini, hanya memuat pendapat dari kelompok Partai Keadilan Sejahtera saja.
- b. **Dua Sisi**, berita menyajikan fakta dari pendapat masing-masing narasumber yang sedang berkonflik. Misalnya, berita konflik Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat tentang kenaikan harga BBM ini memuat pendapat dari sudut pandang PKS yang kontra dengan kenaikan harga BBM, dan juga memuat pendapat dari sudut pandang Partai Demokrat yang pro dengan kenaikan harga BBM.
- c. **Multi Sisi**, berita menyajikan fakta dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda-beda. Misalnya, berita konflik Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat tentang kenaikan harga BBM ini tidak hanya memuat pendapat dari PKS dan Partai Demokrat, tetapi juga dari sudut pandang masyarakat dan pengamat politik.

2.2.2 *Even Handed Evaluation*

Menyajikan evaluasi dari dua sisi secara positif maupun negatif dari fakta atau pihak yang menjadi berita secara bersamaan dan proporsional. *Even handed evaluation* terdiri dari tiga kategori, yaitu:

- a. **Positif**, apabila berita memuat pernyataan yang ditunjukkan dengan kata-kata atau kalimat positif mengenai Partai Keadilan Sejahtera tentang kenaikan harga BBM.
- b. **Negatif**, apabila berita memuat pernyataan yang ditunjukkan dengan kata-kata atau kalimat negatif mengenai Partai Keadilan Sejahtera tentang kenaikan harga BBM.
- c. **Netral**, apabila berita memuat unsur positif dan negatif dari pihak-pihak yang menjadi bahan pemberitaan. Misalnya, berita memuat unsur positif dan negatif tentang konflik Partai Keadilan Sejahtera tentang kenaikan harga BBM.

I. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi kuantitatif. Analisis isi merupakan metode untuk menganalisis isi komunikasi secara sistematis, objektif dan kuantitatif. Objektif memiliki makna bahwa peneliti harus mengesampingkan faktor-faktor yang bersifat subjektif atau bias personal (Kriyantono, 2012:61-62). Peneliti menggunakan analisis isi kuantitatif untuk menganalisis objektivitas pemberitaan konflik antara PKS dan Partai Demokrat tentang kenaikan harga BBM pada Harian Republika melalui unit analisis dan kategori-kategori yang sudah ditentukan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini akan menggambarkan bentuk penyajian dan isi pesan dari berita-berita tentang konflik antara PKS dengan Partai Demokrat mengenai kenaikan harga BBM pada Harian Republika. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti dituntut untuk bersikap objektif dan memisahkan diri dari data. Batasan konsep dan alar ukurnya harus melewati pengujian terlebih dahulu untuk memenuhi prinsip validitas dan reliabilitas (Kriyantono, 2012:57). Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif karena metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan penghitungan secara kuantitatif. Analisis yang dilakukan hanya untuk mendeskripsikan aspek-aspek yang diukur dalam isi sebuah berita. (Eriyanto, 2011:46-47)

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah berita mengenai konflik antara PKS dengan Partai Demokrat tentang kenaikan harga BBM pada Harian Republika periode Maret 2012-Juni 2013. Harian Republika memuat 37 buah artikel berita terkait konflik antara PKS dan Partai Demokrat. Pemilihan periode waktu bulan Maret 2012-Juni 2013 karena pada rentang waktu tersebut merupakan masa-masa puncak konflik antara PKS dan Partai Demokrat yang berselisih paham mengenai kenaikan harga BBM. Selain itu, Harian Republika cukup banyak memberitakan mengenai konflik tersebut.

4. Jenis Data

Artikel berita seputar konflik antara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat tentang kenaikan harga BBM menjadi objek penelitian yang nantinya akan digunakan dalam pengisian *coding sheet*. Data yang diperoleh dari kumpulan artikel berita dari Harian Republika yang berkaitan dengan konflik PKS dan Partai Demokrat periode bulan Maret 2012-Juni 2013 ini merupakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertaman di lapangan (Kriyantono, 2012:43).

Peneliti juga melengkapi data-data penelitian melalui literatur kepustakaan tercetak seperti buku dan jurnal ilmiah, informasi-informasi dari portal berita *online*, *company profile* objek penelitian, dan data-data yang lain yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data pelengkap tersebut merupakan data sekunder, yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder (Kriyantono, 2012:44)

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan berita-berita yang terkait dengan konflik Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat pada Harian Republika. Artikel berita yang dicari dan dikumpulkan berfokus pada topik konflik PKS dan Partai Demokrat mengenai kenaikan harga BBM. Proses pengumpulan data kemudian dilanjutkan dengan menggunakan lembar *coding* atau *coding sheet* sebagai alat pengumpul data. Lembar *coding* sudah berisi

kategori-kategori yang akan dikoding. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dan dua *coder* lainnya.

Selain artikel berita dan lembar *coding*, peneliti juga melengkapi data dari sumber lain seperti profil media dan profil partai yang diperoleh dari internet, penelitian-penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, dan studi pustaka lainnya. Data-data pelengkap ini digunakan sebagai acuan dalam melengkapi teori.

6. Uji Reliabilitas

Analisis isi dikatakan reliabel jika menghasilkan temuan yang sama meskipun dilakukan oleh orang lain (Eriyanto, 2011:16). Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan uji coba penghitungan *coeficient reliability* terlebih dahulu. Uji reliabilitas ini menentukan apakah selanjutnya penelitian layak untuk diteruskan atau tidak.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus pengukuran reliabilitas yang dikemukakan oleh Ole R. Holsti. Uji reliabilitas ini membantu peneliti untuk melihat sejauh mana persetujuan dua pengkoding dalam melihat fenomena pemberitaan konflik PKS dan PD tentang kenaikan harga BBM pada Harian Republika. Berikut ini merupakan rumus Holsti yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur reliabilitas (Eriyanto, 2011:290)

$$\text{Reliabilitas antar-coder (CR)} = \frac{2M}{N1 + N2}$$

Keterangan:

CR : *Coefficient Reliability*

M : Jumlah *coding* yang sama (disetujui oleh masing-masing *coder*)

N1 : Jumlah *coding* yang dibuat oleh *coder* 1

N2 : Jumlah *coding* yang dibuat oleh *coder* 2

TABEL 2
Hasil Penghitungan *Coefficient Reliability* (Percobaan)
Sub Unit Analisis Percampuran Opini dan Fakta

No.	Judul Berita	Peneliti	<i>Coder</i> 1	<i>Coder</i> 2
1.	PKS: Pemerintah tak Seriusi Energi	A	A	A
2.	PKS-PD Makin Panas	B	B	B
3.	SBY Diminta Akhiri Konflik PKS-PD	A	A	A
4.	Perang Spanduk PKS Vs Demokrat	B	B	B
5.	Koalisi Tekan PKS Soal BBM	A	B	B
6.	PKS Bulat Tolak Kenaikan BBM	B	B	B
7.	PKS tak Anggap Demokrat Mitra	B	B	B
8.	Setgab Keluarkan PKS	B	B	A
9.	Sikap PKS Sudah Tepat	A	B	A
10.	PKS Didepak, Menteri Aman	B	B	B

Sumber: *Coding sheet, diolah (2014)*

A= Ada

B= Tidak Ada

$$\text{Coefficient Reliability Peneliti dengan } \textit{Coder} 1 = \frac{2.8}{10+10} = 0,8$$

$$\text{Coefficient Reliability Peneliti dengan } \textit{Coder} 2 = \frac{2.8}{10+10} = 0,8$$

Tabel di atas menunjukkan sebagian besar berita dibuat tanpa adanya percampuran antara opini wartawan dengan fakta. Namun masih terdapat artikel yang memuat opini wartawan dalam pemberitaan. Penghitungan CR antara

peneliti dengan *coder 1* dan *coder 2* mencapai angka 0,8. Penghitungan dengan rumus Holsti ini memiliki angka reliabilitas minimum yaitu 0,7 atau 70% (Eriyanto, 2011:290). Ini memiliki arti bahwa dikatakan reliabel jika hasil penghitungan menunjukkan angka lebih dari 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penghitungan dinyatakan reliabel dan penelitian dapat dilanjutkan.

7. Metode Analisis Data

Peneliti memilih dua *coder* yang dianggap memiliki kemampuan terhadap topik yang diteliti. Lembar *coding* diisi oleh peneliti bersama dengan kedua *coder*. Lembar *coding* tersebut terstruktur, sudah memuat kategori yang dikoding. Peneliti dan kedua *coder* membaca teks berita yang menjadi objek penelitian, kemudian mengisi lembar *coding* berdasarkan teks berita yang sudah dibaca. Peneliti dan kedua *coder* akan melakukan pencatatan yang sama berdasarkan batasan yang ada dalam definisi operasional. Semakin tinggi hasil pengkodean, maka semakin reliabel hasil yang diperoleh.